

BAB IV

MENGUATNYA PEREKONOMIAN INDONESIA

Bab ini kita membahas kondisi perekonomian Indonesia dimata dunia dan juga berpengaruh serta menjadi bahan pertimbangan IMF-WB atas terpilihnya Sri Mulyani menjadi DC Chair.

A. Perekonomian

1. Ekonomi Global

Pada kesempatan itu juga, Sri Mulyani memberikan penjelasan mengenai kondisi ekonomi Indonesia, reformasi yang tengah dilakukan, serta ambisi pemerintah untuk bisa merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kualitas yang baik. Perekonomian global yang masih belum sesuai dengan harapan memberikan tantangan bagi perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi global yang masih lemah dan harga komoditas yang rendah hingga berisiko menurunkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi perlu mendapat perhatian karena tidak hanya menurunkan kinerja korporasi, tetapi juga memunculkan tantangan bagi upaya penguatan kinerja perbankan, peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan pengelolaan kebijakan fiskal. Tantangan akan menjadi semakin kompleks karena stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan dapat terganggu. Tekanan terhadap stabilitas ekonomi semakin berisiko meningkat karena di saat bersamaan ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi. Dalam perkembangannya, penyesuaian ekonomi domestik

yang baik dan ditopang oleh respons sinergi kebijakan yang solid mampu mitigasi risiko dari kondisi perekonomian dunia yang tidak menguntungkan tersebut.

2. Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh permintaan domestik sedangkan ekspor masih lemah. Kinerja tersebut ditopang oleh stimulus fiskal terutama serta dampak positif pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial. Respons kebijakan makroekonomi dapat menjaga keyakinan konsumen dan membuat konsumsi rumah tangga tetap kuat. Perbaikan ekonomi juga mulai didukung perbaikan ekspor, sejalan dampak positif kenaikan harga komoditas global. Perkembangan ini kemudian memberikan dampak pengganda ke sektor investasi swasta yang juga mulai meningkat. Secara spasial, perbaikan ekonomi terutama terlihat di Sumatera, Jawa dan Kalimantan sedangkan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sedikit melambat akibat kinerja sektor pertambangan yang belum kuat. Perbaikan ekonomi ditopang oleh stimulus fiskal, sambil tetap menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal.

Ruang stimulus fiskal cukup terbuka terutama, sebagai dampak positif berlanjutnya reformasi anggaran melalui pengalihan belanja subsidi energi ke belanja infrastruktur. Di tengah upaya memberikan stimulus fiskal tersebut, berbagai upaya juga dilakukan Pemerintah guna memperkuat struktur penerimaan pajak. Pemerintah menerapkan kebijakan amnesti pajak yang dinilai sangat berhasil dibandingkan dengan capaian banyak negara lain. Pemerintah menempuh kebijakan fiskal yang konsolidatif guna tetap menjaga

kredibilitas prospek kesinambungan fiskal. Berbagai arah kebijakan fiskal dapat mengendalikan defisit APBN-P tetap sehat. Sementara itu, rasio utang Pemerintah terhadap PDB tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat didukung oleh inflasi yang terkendali. Inflasi tercatat cukup rendah sehingga sama dengan capaian yang berada dalam rentang sasaran. Perkembangan inflasi yang rendah dipengaruhi oleh permintaan agregat yang terkelola baik, nilai tukar rupiah yang menguat dan ekspektasi inflasi yang menurun. Berbagai faktor tersebut berkontribusi kepada inflasi inti yang cukup rendah. Inflasi yang rendah juga dipengaruhi inflasi kelompok administered prices yang rendah sebagai akibat penurunan harga beberapa komoditas energi strategis seperti BBM, tarif tenaga listrik untuk golongan pelanggan di atas 2.200 VA, dan LPG 12 kg.

Sementara itu, inflasi volatile food cukup terkendali, meskipun sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian akibat gangguan pasokan terkait La Nina. Secara keseluruhan, koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi, termasuk melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi, baik di tingkat pusat (TPI) maupun daerah (TPID) berkontribusi positif pada inflasi yang rendah. Stabilitas makroekonomi yang terkendali turut dipengaruhi nilai tukar rupiah yang bergerak menguat. Berbeda dengan mata uang negara kawasan yang mencatat depresiasi. Sementara secara tren penguatan rupiah terutama terlihat, sebelum kemudian sempat tertekan menjelang akhir tahun. Penguatan rupiah tidak terlepas dari pengaruh ketahanan ekonomi domestik, termasuk defisit transaksi berjalan yang menurun, dan dampak positif dari program amnesti pajak Pemerintah yang meningkatkan

keyakinan penanaman modal di Indonesia. Berbagai persepsi positif tersebut kemudian menyebabkan berlanjutnya aliran masuk modal asing dan akhirnya mendorong rupiah dalam tren menguat.

Nilai tukar rupiah yang dalam tren menguat didukung oleh perbaikan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan ketahanan sektor eksternal. Perkembangan ekonomi global memberikan tantangan bagi perbaikan NPI. Namun, proses penyesuaian domestik seperti konsolidasi internal korporasi, nilai tukar yang bergerak sesuai fundamental, serta persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, termasuk dampak amnesti pajak, dapat menopang perbaikan komponen utama NPI yakni neraca transaksi berjalan dan neraca transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan menurun dari PDB yang dipengaruhi oleh perbaikan neraca perdagangan migas dan nonmigas. Sementara itu, transaksi modal finansial mencatat kenaikan surplus akibat peningkatan aliran modal masuk dipengaruhi oleh persepsi positif terhadap ketahanan ekonomi domestik, termasuk dampak kebijakan amnesti pajak. Secara keseluruhan, NPI mencatatkan surplus 12,1 miliar dolar AS dan mendorong peningkatan cadangan devisa menjadi 116,4 miliar dolar AS.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga ditopang oleh stabilitas sistem keuangan yang terjaga dengan risiko sistemik yang rendah. Kinerja perbankan secara umum tetap baik dan pasar keuangan domestik masih cukup stabil seperti tercermin dari Indeks stabilitas sistem keuangan yang masih rendah. Khusus industri perbankan, berbagai indikator menunjukkan ketahanan perbankan masih tetap kuat. Indikator likuiditas perbankan membaik, yang antara lain dipengaruhi oleh ekspansi keuangan pemerintah dan

dampak pelonggaran GWM Bank Indonesia. Indikator kecukupan modal perbankan (CAR) juga meningkat. Sementara itu, risiko kredit yang mencerminkan indikator rasio Non Performing Loan (NPL) masih cukup terkendali, peningkatan NPL dan investasi swasta yang belum kuat terindikasi berpengaruh kepada pertumbuhan kredit perbankan yang belum kuat. Kredit perbankan yang belum kuat mendorong alternative sumber pembiayaan dari nonbank seperti penerbitan saham, obligasi, NCD, dan MTN. Pembiayaan bruto nonbank bertumbuh signifikan. Stabilitas sistem keuangan 16 yang terpelihara juga tidak terlepas dari kondisi sistem pembayaran nasional yang tetap baik.

Berbagai indikator sistem pembayaran dalam tren meningkat ditopang oleh penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia dan industri yang tetap baik dan tanpa gangguan signifikan. Nilai transaksi sistem pembayaran masih dalam tren meningkat, dengan nilai transaksi ritel nontunai bertumbuh. Rasio nilai transaksi sistem pembayaran ritel terhadap nilai konsumsi juga meningkat yang mengindikasikan pergeseran preferensi masyarakat untuk menggunakan instrumen pembayaran nontunai dalam pengeluaran konsumsinya. Dari sisi sistem pembayaran tunai, pengelolaan uang rupiah tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai baik dari sisi jumlah, jenis pecahan, ketepatan waktu, serta kondisi yang layak edar. Berbagai perkembangan positif sistem pembayaran nasional tidak terlepas dari komitmen Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran untuk menjaga kelancaran proses transaksi bagi seluruh pelaku ekonomi sehingga dapat menopang perekonomian.

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Keadaan Perekonomian Indonesia

Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun. Kondisi ini dipengaruhi kenaikan pekerja penuh waktu yang meningkat dari total angkatan kerja pada Agustus. Perbaikan tersebut juga ditopang kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Secara keseluruhan, hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga-kerja antara lain terlihat pada job vacancy online yang sejak awal tahun cenderung meningkat sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi. Beberapa perkembangan positif terkait daya serap tenaga kerja juga mengemuka. Data menunjukkan perekonomian domestik mampu menyerap tambahan tenaga kerja. Daya serap yang tinggi tersebut antara lain dipengaruhi peran Lapangan Usaha (LU) Jasa, LU Keuangan, LU Transportasi, dan LU Perdagangan yang banyak menyerap tenaga kerja. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan daya serap tenaga kerja di LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Perdagangan Besar dan Eceran ialah dampak positif perkembangan pesat bisnis online baik dari aspek e-commerce maupun aspek jasa transportasi berbasis aplikasi.

Perkembangan positif lain ialah penurunan tingkat pengangguran terjadi pada hampir seluruh tingkat pendidikan, khususnya menengah dan tinggi. Perbaikan pertumbuhan ekonomi juga berdampak positif pada penurunan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin berkurang, perkembangan ini kemudian berdampak pada penurunan pangsa penduduk miskin terhadap total penduduk di Indonesia. Perbaikan tingkat kemiskinan terutama terjadi pada wilayah perkotaan sedangkan perbaikan tingkat kemiskinan di

wilayah perdesaan masih terbatas. Pangsa penduduk miskin di wilayah perkotaan terhadap total penduduk di kota menurun, Ketimpangan pendapatan juga menurun sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta perbaikan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Perkembangan positif ini tercermin pada penurunan rasio Gini, Penurunan ketimpangan pendapatan terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan, sebagaimana terlihat pada penurunan rasio Gini. Perkembangan positif di pedesaan antara lain dipengaruhi dampak positif Program Dana Desa dan Dana Bantuan Sosial yang ditempuh oleh Pemerintah. Kinerja korporasi nonkeuangan relatif terbatas sejalan dengan upaya korporasi yang lebih mengutamakan konsolidasi internal daripada melakukan ekspansi usaha.

Terbatasnya kinerja korporasi tercermin dari beberapa indikator, seperti pertumbuhan penjualan dan asset turnover serta inventory turnover yang mengalami penurunan. Secara sektoral, kinerja korporasi di sektor komoditas mengalami penurunan yang lebih dalam akibat permintaan dan harga komoditas di pasar global yang menurun. Melambatnya kinerja korporasi sektor komoditas kemudian berdampak pada kinerja korporasi di sektor pendukung, terutama sektor pengangkutan dan perdagangan, sehingga sektor korporasi secara agregat menunjukkan perlambatan kinerja. Di tengah perlambatan kinerja, profiabilitas korporasi masih menunjukkan tren perbaikan sejak sejalan dengan upaya konsolidasi dan efisiensi yang dilakukan dan terjaganya profit margin. Perbaikan kinerja terlihat pada indikator return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) yang meningkat, antara lain dialami oleh korporasi di sektor infrastruktur, barang konsumsi, dan pertanian.

Sementara itu, profiabilitas korporasi di sektor komoditas pertambangan masih negative. Sebagai antisipasinya, korporasi melakukan upaya konsolidasi dan efisiensi dengan cara menekan biaya operasional untuk menurunkan harga pokok penjualan atau cost of goods sold (COGS). Selanjutnya, guna menjaga profit margin, korporasi mempertahankan harga jual produknya. Data berdasarkan kinerja 448 korporasi yang go-public di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga dampak penurunan penjualan terhadap laba menjadi tertahan. Perilaku korporasi di sektor komoditas ini tercermin dari Gross Profit Margin yang meningkat. Merespons kinerja usaha yang menurun, korporasi terindikasi melakukan konsolidasi internal dengan menurunkan utang (leverage).

Utang korporasi, baik secara gregat maupun korporasi di sektor komoditas, mengalami penurunan sebagaimana tercermin dari indikator debt to equity ratio (DER) yang menurun. Sejalan dengan menurunnya tingkat penjualan, korporasi mengurangi utang terutama dalam bentuk utang jangka pendek yang biasa digunakan untuk keperluan modal kerja. Konsolidasi yang dilakukan korporasi menyebabkan penurunan suku bunga kredit dan yield obligasi akibat pelonggaran kebijakan moneter belum dapat mendorong peningkatan utang korporasi dan ekspansi usaha. Penurunan suku bunga kredit memberi manfaat sebatas pada penurunan biaya bunga korporasi. Dengan demikian, upaya konsolidasi korporasi dapat menjaga kemampuan membayar utang korporasi sebagaimana tercermin dari interest coverage ratio (ICR) yang cenderung stabil. Penurunan tingkat leverage korporasi juga terindikasi dari posisi Utang Luar Negeri (ULN) swasta yang menurun. Posisi ULN swasta menurun, Penurunan ULN tersebut merupakan indikasi

berkurangnya eksposur risiko valuta asing bagi korporasi swasta. Upaya penurunan utang luar negeri tersebut ditengarai banyak dilakukan oleh korporasi di sektor komoditas. Hal tersebut karena korporasi di sektor komoditas merupakan korporasi yang berorientasi ekspor sehingga cenderung memiliki utang luar negeri¹⁶⁵

Dengan Pemerintah juga ditempuh melalui beberapa inisiatif untuk meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing kawasan perkotaan sebagai sumber pertumbuhan baru (smart city), mengembangkan infrastruktur maritim, dan memperbaiki daya saing produk manufaktur. Di bidang keuangan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama dalam aspek pencegahan dan penanganan krisis. Untuk mendukung fungsi KSSK sebagaimana amanat Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi secara bilateral dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam kerangka makro-mikroprudensial.

Koordinasi juga ditempuh dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya mendorong pendalaman pasar keuangan dan keuangan inklusif. Selain itu, koordinasi kebijakan untuk pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah melalui wadah Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga terus ditempuh. Secara umum, bauran kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia dapat memperkuat ketahanan perekonomian domestik, di tengah kondisi global yang masih kurang

menguntungkan. Perkembangan positif tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang tetap terpelihara. Pertumbuhan ekonomi meningkat dan dibarengi dengan inflasi yang cukup rendah yakni, defisit transaksi berjalan yang menurun dari PDB, dan nilai tukar rupiah yang tetap terkendali.

2. Stabilitas Ekonomi Indonesia

Stabilitas sistem keuangan juga terpelihara ditopang oleh ketahanan perbankan yang masih baik dan pasar keuangan domestic yang cukup stabil. Ke depan, bauran kebijakan yang telah ditempuh akan terus diperkuat guna mendukung berlanjutnya proses penguatan perekonomian nasional. Koordinasi terkait Stabilitas Sistem Keuangan Pengelolaan stabilitas sistem keuangan menghadapi beberapa tantangan, baik yang bersumber dari global maupun domestik. Risiko dari sisi global terutama terkait dengan berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada menurunnya volume permintaan dan harga komoditas global. Kondisi tersebut selanjutnya berimbas pada kinerja ekspor dan sektor korporasi Indonesia yang menurun. Penurunan kinerja korporasi tersebut kemudian meningkatkan risiko kredit perbankan. Berbagai risiko juga masih membayangi pasar keuangan global, khususnya terkait dengan ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan AS (Fed Funds Rate), dan sentimen politik global yang dapat memicu terjadinya pembalikan arus modal. Sementara risiko domestik terkait kekhawatiran terhadap penerimaan pajak merupakan faktor yang menjadi perhatian di tengah berlangsungnya konsolidasi perekonomian. Merespons berbagai risiko tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan

otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik. Koordinasi utamanya dilakukan dalam aspek pencegahan dan penanganan krisis melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang telah terbentuk. KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi melakukan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan penanganan krisis sistem keuangan, serta penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis.

UU PPKSK memberikan landasan hukum yang kuat dalam penanganan krisis keuangan. Terlebih sesuai amanat UU PPKSK, penetapan status krisis dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dengan mempertimbangkan rekomendasi KSSK. Dalam pelaksanaan fungsinya, KSSK didukung oleh Protokol Manajemen Krisis (PMK) di setiap lembaga yang bertugas melakukan asesmen risiko sesuai bidang kerjanya masing-masing. Dalam forum tersebut, Bank Indonesia secara rutin menyampaikan asesmen terkait perkembangan ekonomi makro dan nilai tukar baik di tingkat teknis, tingkat deputi (Deputies' Meeting) dan high-level (Rapat KSSK). Untuk itu, Bank Indonesia juga memperkuat pengaturan internal terkait Protokol Manajemen Krisis (PMK) dan mempertajam alat analisis pemantauan risiko. Bank Indonesia memperbarui ketentuan internal sesuai dengan perkembangan organisasi serta menyelaraskan dengan pokok-pokok ketentuan UU PPKSK.

Ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan internal tentang PMK. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat kerangka kerja

(framework) pemantauan risiko, termasuk indikator pemantauan risiko agar dapat menangkap lebih dini peningkatan potensi risiko perekonomian, khususnya di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran. Dalam rangka menguji kesiapan protokol KSSK berdasarkan UU PPKSK,

Bank Indonesia berpartisipasi dalam simulasi krisis nasional dan menyelenggarakan simulasi krisis secara internal. Simulasi krisis nasional telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya dengan melibatkan seluruh level, termasuk pimpinan lembaga anggota KSSK (Full-Dress). Simulasi yang dilaksanakan pada 15 September 2016 ditujukan untuk menguji operasionalisasi UU PPKSK serta aturan pelaksanaannya. Melalui simulasi tersebut, mekanisme koordinasi antar anggota KSSK diharapkan semakin optimal. Simulasi krisis juga dilakukan secara internal di Bank Indonesia dengan melibatkan seluruh satuan kerja terkait (Bank Indonesia Wide) guna menguji kesiapan Protokol Manajemen Krisis (PMK) dalam kondisi tekanan. Selain itu, Bank Indonesia berpartisipasi dan berkoordinasi dalam rangka Financial Sector Assessment Program (FSAP) dengan menjadi bagian dari Tim Kerja Nasional FSAP bersama dengan Kemenkeu, OJK, dan LPS.

3. Koordinasi Mengelola Persepsi Positif Perekonomian Domestik

Momentum pemulihan ekonomi juga perlu didukung oleh pengelolaan persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik. Hal ini karena perilaku investor dalam berinvestasi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kondisi perekonomian negara tersebut. Persepsi tersebut

umumnya terkait dengan iklim investasi dan tingkat risiko di suatu negara yang ditunjukkan oleh indikator-indikator fundamental ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit neraca transaksi berjalan, cadangan devisa, dan peringkat kredit negara (sovereign credit rating). Di pasar keuangan global, sovereign credit rating merupakan indikator yang merefleksikan kemampuan suatu negara untuk membayar kewajiban pinjaman luar negerinya sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Penilaian sovereign credit rating dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang secara umum didasarkan pada aspek kondisi dan prospek ekonomi makro, kinerja keuangan pemerintah, risiko eksternal, efektivitas institusi, serta kinerja sektor fikal dan moneter. Secara empiris, sovereign credit rating terbukti memberikan pengaruh pada besarnya biaya pinjaman (cost of borrowing) bila suatu Negara hendak menerbitkan surat utang. Sovereign credit rating suatu negara juga berperan sebagai benchmark bagi rating yang diberikan kepada perusahaan swasta di negara tersebut, sehingga secara tidak langsung juga akan memengaruhi biaya investasi di sektor swasta. Selain itu, sovereign credit rating turut menentukan akses suatu negara ke pasar dana internasional.

Dalam rangka koordinasi untuk memelihara persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia, maka dibentuk Investor Relation Unit (IRU) Nasional. Bank Indonesia bertindak sebagai Sekretariat IRU Nasional yang bertugas melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka perumusan strategi komunikasi kepada investor dan lembaga pemeringkat. Selain itu, dalam upaya untuk mengurangi asimetri informasi, IRU Nasional secara rutin melakukan pengumpulan data dan informasi resmi dari berbagai Kementerian, Lembaga, serta Otoritas

untuk disampaikan kepada lembaga pemeringkat. Hingga saat ini, IRU Nasional secara konsisten berhasil mengelola persepsi positif tiga lembaga pemeringkat utama, yaitu Fitch Ratings, Moody's Investor Service, dan Standard and Poors (S&P).

Penilaian rating dari tiga lembaga tersebut menjadi rujukan investor di pasar global dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu juga terdapat dua lembaga pemeringkat Jepang yang secara rutin melakukan asesmen terhadap Indonesia dan menjadi rujukan bagi investor Jepang, yakni Japan Credit Rating Agency (JCRA) dan Rating and Investment Information Corporation (R&I). Koordinasi melalui IRU Nasional berhasil memelihara persepsi positif lembaga pemeringkat. Indonesia tercatat memiliki peringkat layak investasi (investment grade) berdasarkan penilaian dari Fitch dan Moody's, serta lembaga pemeringkat Jepang. Selanjutnya, lembaga pemeringkat Fitch meningkatkan outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari Stable menjadi Positive. Fitch menyatakan bahwa terdapat tiga faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook tersebut. Pertama, kinerja stabilitas makroekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi global. Kedua, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan. Ketiga, reformasi struktural yang konsisten terbukti mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Upaya mengelola persepsi positif juga dilakukan di daerah, khususnya untuk meningkatkan investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Bank

Indonesia turut aktif meningkatkan daya tarik investasi di daerah melalui pembentukan Regional Investor Relations Unit (RIRU) dengan pilot project di lima provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Melalui forum RIRU tersebut, Bank Indonesia membangun kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya dalam memfasilitasi aktivitas promosi dan pengelolaan persepsi positif investasi di daerah.

Pilot Project RIRU di 5 provinsi tersebut terus mengembangkan dan menyempurnakan informasi tentang perkembangan ekonomi daerah serta potensi investasi daerah. RIRU Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Timur bahkan telah melakukan promosi investasi daerah masing-masing di luar negeri. Di tataran global, upaya untuk menarik aliran masuk modal asing ke Indonesia dilakukan melalui pembentukan Global Investor Relations Unit (GIRU). Keberadaan GIRU direncanakan menjadi wadah koordinasi antara Kantor Perwakilan BI di luar negeri (KPwLN) dengan perwakilan Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya dengan Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal (KBRI/KJRI) dan Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) yang dikelola oleh BKPM. Mempertimbangkan lokasi geografi yang lebih dekat dengan investor luar negeri, GIRU diharapkan berperan sebagai perpanjangan tangan fungsi IRU Nasional dalam melakukan kegiatan hubungan investor antara lain melalui diseminasi perkembangan terkini ekonomi Indonesia.

Sinergi IRU, RIRU, dan GIRU dilakukan untuk memperkuat pengelolaan persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sinergi tersebut antara lain diwujudkan dalam kegiatan investor summit yang

diselenggarakan oleh KBRI/KJRI untuk mempertemukan permintaan dan penawaran investasi, khususnya di sektor riil. Pada forum tersebut, IRU berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan investor dengan potensi investasi di Indonesia. Sementara itu, GIRU berperan mempromosikan perkembangan ekonomi nasional dan RIRU mempromosikan perkembangan dan potensi ekonomi daerah.¹

Dana Moneter Internasional (IMF) menilai kondisi perekonomian Indonesia masih positif. Dibandingkan dengan negara lain, IMF menyatakan perekonomian Indonesia masih berjalan dengan baik. Banyak negara lain ingin belajar dari Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh banyaknya jumlah populasi muda. Populasi muda ini pada akhirnya akan memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun. Hal tersebut, pada akhirnya menciptakan potensi pertumbuhan. Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan. IMF sendiri memprediksi pertumbuhan Indonesia sedikit di bawah target pemerintah. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut yang perlu dilakukan adalah menghasilkan lapangan kerja sehingga negara bisa mendapatkan keuntungan dari dividen demografis. Selain membuka lapangan kerja yang lebih luas, pemerintah juga perlu melakukan beberapa pekerjaan rumah lainnya. Luis mengatakan pemerintah perlu menjaga disiplin finansial, tingkat inflasi dan stabilitas makro ekonomi.

¹Indonesia, B. (2016). Laporan Perekonomian Indonesia.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan bereaksi terhadap faktor eksternal. Pemerintah, kata dia, harus waspada terhadap beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan Cina dan suku bunga Amerika Serikat. Indonesia punya penyangga untuk merespon sesuatu yang salah terjadi dari luar. Baik bagi Indonesia jika harga minyak naik. Tapi buruk, jika terjadi perlambatan ekonomi Cina atau kenaikan cepat tingkat suku bunga AS. Selain itu, agar pemerintah memodernisasi peraturan di Indonesia. Sebab, penerapan desentralisasi membutuhkan penyelarasan antara aturan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah harus meningkatkan pendidikan untuk populasi muda. Dan agar pemerintah dapat membenahi sektor keuangan yang menurutnya tidak terlalu efisien. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terlalu banyak peraturan. Indonesia juga masih memiliki beberapa kendala untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Kendala tersebut di antaranya, ketergantungan yang berlebihan pada komoditas. Jika harga komoditas turun, pendapatan negara juga akan turun. Kendala lainnya adalah investasi pemerintah pada proyek infrastruktur yang butuh waktu lama untuk mempengaruhi ekonomi. Menurut dia ada sejumlah resiko fiskal jika proyek tersebut mangkrak. Namun, IMF menganggap proyek infrastruktur juga penting, sebab Indonesia tertinggal jauh dalam hal infrastruktur dibanding negara lain. Dalam jangka pendek, proyek infrastruktur telah berdampak pada ekonomi melalui belanja pemerintah. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini perekonomian Indonesia cukup stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh tingginya konsumsi domestik.

Teknologi harus mampu mengembangkan produktivitas. Untuk itu, Indonesia harus mengoptimalkan pengembangan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengentaskan kesenjangan. Sebelumnya, dunia telah melihat tiga jenis Revolusi Industri, yaitu mesin uap, elektrifikasi (tenaga listrik), dan teknologi informasi. Sekarang berada di era persimpangan jalan di mana *online* vs konvensional, produktivitas vs tidak produktif, menciptakan lapangan pekerjaan vs pengangguran, dan *big data* vs privasi. Perkembangan teknologi dari sudut pandang kebijakan yang harus disiapkan oleh Pemerintah dengan pembicara yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Kemenkeu, ditegaskan Sri Mulyani, bersama para Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan mulai menyalisir pos belanja tiap penyelenggara negara, tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk tetap menggenjot belanja prioritas. Misalnya, pembangunan infrastruktur, belanja pendidikan, tunjangan profesi guru, tunjangan belanja kesehatan akan tetap diprioritaskan. Menurut Sri Mulyani adalah dari kondisi ekonomi dunia yang mengalami perlambatan saat ini. Kondisi ini juga mengakibatkan situasi perdagangan luar negeri memberikan pengaruh terhadap kinerja ekspor dan impor dalam negeri. Kalau lihat statistik ekspor maupun impor, itu mengalami kontraksi dari kuartal satu ini.²

²Emilia, R. (2013). *Praktek Diplomasi*. Jakarta: Badouse Media.